

STRATEGI BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI DALAM UPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN PASCA ERUPSI 2010

MERAPI MOUNTAIN FOREST CONSERVATION STRATEGY OF NATIONAL PARK ASSOCIATION POST 2010 ERUPTION

G Pratidina^{1a} dan RD Rahmawati²

¹ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720

² Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720

^a Korespondensi: Ginung Pratidina, Email: ginung.pratidina@unida.ac.id
(Diterima: 23-03-2015; Ditelaah: 25-03-2015; Disetujui: 29-03-2015)

ABSTRACT

Merapi mountain's existence and charms as a tourist destination attracts many despite its active volcanoes. Damages following 2010 eruption calls Merapi Mountain National Park Association for a new forest conservation strategy to be put in place. The purpose of this research is to analyse Merapi Mountain National Park supervision strategy and its community participation in conserving forest resources. This research applies descriptive analysis approach by collecting data through observation, interviews and literature reviews; which will then be tested by quality analysis. The outcome shows community participation in natural resources preservation and ecosystems balance has not yet been optimal. The society tends to gravitate towards acceptance attitude and therefore a more comprehensive strategy is required to support the surrounding community welfare and their life quality.

Key words: eruption, Merapi National Park, strategy.

ABSTRAK

Gunung Merapi dikenal sebagai gunung berapi yang aktif, namun keberadaan dan pesonanya sebagai destinasi pariwisata menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pasca erupsi tahun 2010 banyak kerusakan terjadi di wilayah sekitar Gunung Merapi. Hal ini memerlukan kebijakan baru terhadap strategi Balai Taman Nasional Gunung Merapi sebagai upaya konservasi sumber daya hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi dan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya hutan pasca erupsi 2010. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, selanjutnya menganalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya belum optimal dan masyarakat cenderung menerima sehingga memerlukan strategi yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Kata kunci: pasca erupsi 2010, strategi, Taman Nasional Gunung Merapi.

Pratidina G dan RD Rachmawati. 2015. Strategi Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam upaya konservasi sumber daya hutan pasca erupsi 2010. *Jurnal Sosial Humaniora* 6(1): 47-53.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki lahan hutan cukup besar, Indonesia dikenal sebagai negara

megadiversity terbesar ketiga di dunia. Namun, untuk hal fauna endemik, Indonesia menjadi negara terbesar keanekaragaman hayatinya (Andono 2008). Kondisi tersebut, seharusnya

merupakan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Akan tetapi, sejalan dengan melimpahnya kekayaan alam yang dimilikinya, kondisi tersebut juga ternyata menimbulkan kerawanan. Pada penghujung tahun 2010 terjadi erupsi Merapi. Erupsi tersebut merupakan erupsi terburuk sejak tahun 1870 karena menelan korban jiwa di 32 desa dengan 70000 jiwa terkena dampak langsungnya (Antaraneews 2010). Erupsi Merapi yang terjadi pada 26 Oktober 2010 pada pukul 17.00 WIB merupakan letusan yang terparah yang pernah ada, karena pada tahun 2010 beberapa kali Merapi sempat dinaikkan levelnya menjadi waspada. Letusan tersebut masih berkelanjutan sampai akhirnya pada tanggal 5 November 2010 dini hari Merapi meletus dengan erupsi yang lebih dasyat dan akibat letusan ini perlebaran radius aman menjadi 20 km. Erupsi tersebut selain mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan rumah-rumah penduduk, penduduk harus berpindah tempat tinggal karena tempat tinggal mereka semula sudah tidak dapat ditempati lagi dan menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitar Gunung Merapi. Kerusakan di kawasan TNGM menjadikan kawasan itu memerlukan upaya pengelolaan konservasi lebih lanjut, salah satunya dengan penetapan zonasi-zonasi yang perlu diperbaharui mengingat banyaknya kawasan yang rusak dan memerlukan upaya perbaikan akibat erupsi tersebut.

Pengaturan konservasi lebih lanjut terdapat dalam Pasal 57 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa kegiatan konservasi merupakan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup. Adapun batasan-batasan kegiatan konservasi terdapat dalam pasal 57 ayat 2, sedangkan konservasi sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 1 ayat 2 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dijelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Di dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Perlindungan atas keanekaragaman hayati harus benar-benar dilakukan secara ketat, tetapi harus tetap melibatkan kepentingan umum. Menurut *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)*, *World Conservation Monitoring Centre, UK* Daerah yang dilindungi ini diklasifikasikan ke dalam lima kategori menurut tujuan manajemennya yaitu sebagai berikut (WRI, IUCN, dan UNEP 1995).

1. Daerah yang dilindungi ketat.
 - a. *Reserve* alam ketat. Secara umum, daerah yang lebih kecil menekankan perlindungan nilai alami yang penting dengan bobot gangguan manusia minimum.
 - b. Taman nasional. Secara umum, daerah yang agak luas dengan sederetan ciri-ciri kelebihan yang istimewa serta yang boleh dikunjungi orang untuk keperluan pendidikan, rekreasi, dan inspirasi selama mereka tidak membahayakan nilai yang terkandung di daerah itu.
 - c. Monumen alam. Monument alam mirip dengan taman nasional tapi biasanya daerahnya lebih kecil untuk melindungi satu ciri istimewa dari pemandangan alam atau tempat bersejarah.
2. Daerah yang dilindungi ekstraktif.
 - a. Daerah manajemen habitat dan margasatwa. Daerah yang dikelola untuk melindungi dan memanfaatkan spesies margasatwa.
 - b. Lanskap yang dilindungi. Daerah yang terdiri atas tanah milik negara atau swasta yang mungkin berkaitan dengan interaksi sumber daya (pertanian, hutan, daerah air tawar dan pantai). Tujuannya adalah untuk memelihara kualitas lanskap secara keseluruhan, interaksi manusia yang harmonis dengannya, dan keanekaragaman hayati yang dikandungnya.

Sebagai salah satu jenis strategi, maka pembahasan strategi kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari pengertian strategi organisasi. Strategi menurut Stainer dan Meiner (1988) merupakan penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal

perumusan kebijakan, serta strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Selanjutnya, Goldworthy dan Ashley (dalam Salusu 1996) mengusulkan tujuh aturan untuk strategi yaitu strategi harus: (1) menjelaskan dan menginterpretasi masa depan tidak hanya saat sekarang; (2) menentukan rencana dan bukan sebaliknya rencana menentukan strategi; (3) berfokus pada keunggulan kompetitif tidak semata mata pada keuangan; (4) diaplikasikan dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas; (5) mempunyai orientasi eksternal; (6) fleksibel; (7) berpusat pada hasil jangka panjang.

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana strategi yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam upaya konservasi sumber daya alam pasca erupsi 2010?; (2) bagaimana peran serta masyarakat dalam mengembalikan konservasi hutan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi pasca erupsi 2010 dan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya hutan pasca erupsi 2010.

MATERI DAN METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi tanpa ada upaya menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono 2008). Dalam hal ini, digambarkan bagaimana suatu kebijakan yakni strategi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Merapi melalui instrumen yang dimilikinya berupaya untuk menghidupkan kembali alam yang rusak pasca erupsi 2010. Responden penelitian berjumlah 60 orang yang tersebar di empat desa di Kabupaten Klaten, Sleman, Magelang, dan Boyolali. Sampel yang digunakan adalah *purposive sample*, yakni responden yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui tentang program Balai Taman Nasional Gunung Merapi seperti kepala desa, kepala dusun, petugas polisi hutan, ketua RT, dan tokoh masyarakat. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan TNGM yang mencakup dua provinsi meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta empat kabupaten yakni Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten dengan lokasi desa terdekat, antara lain:

1. Kabupaten Sleman dengan lokasi di Dusun Kinahrejo,
2. Kabupaten Magelang dengan lokasi Dusun Njenglik dan Salam Sari,
3. Kabupaten Boyolali dengan lokasi Dusun Selo, dan
4. Kabupaten Klaten dengan lokasi Dusun Balerante.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya menghidupkan kembali kawasan Gunung Merapi juga dilaksanakan di 30 wilayah daerah penyangga TNGM melalui kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Upaya tersebut diimplementasikan ke dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

Kabupaten Sleman

Penelitian ini dilakukan di Desa Girikerto, tepatnya di Dusun Ngandong, yakni dusun terakhir sebelum masuk ke kawasan TNGM. Dusun ini dikepalai oleh Pak Ngadimin selaku Pak Kepala Dusun dengan 280 KK dan mayoritas bermata pencaharian petani salak dan peternak. Kondisi pasca erupsi mengakibatkan dusun ini tertutup abu dan juga merusak tanaman salak yang siap untuk dipanen. Petani mengalami kerugian yang tidak sedikit dan tidak ada kompensasi atas kerugian gagal panen salak tersebut. Kerusakan kawasan TNGM di dusun tersebut diatasi dengan penghijauan oleh Pemerintah yaitu Dinas Kehutanan dan pihak swasta (PAMA). Tumbuhan yang diberikan untuk penghijauan berupa bibit sengon, bambu, dan buah-buahan seperti mangga. Selain penghijauan dari pemerintah dan swasta, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menanam tanaman untuk pemulihan kondisi alam dengan dana pribadi. Dalam hasil wawancara dengan Pak

Ngadimin Kepala Dusun Ngandong, peran BTNGM dalam upaya penghijauan sendiri sudah dilakukan yakni dengan menanam di lahan TNGM dan memberdayakan kurang lebih 30 masyarakat sekitar dalam proses penanaman dengan memberikan upah sekitar Rp. 30.000 perhari. Adapun proses pelibatan masyarakat tersebut selain menanam tanaman tersebut juga *mbabati rumput, gulma*, dan memberi pupuk. Balai Taman Nasional Gunung Merapi memiliki program pemberdayaan masyarakat sekitar dengan memberikan bibit gurame dan jamur tiram untuk dibudidaya, tetapi usaha tersebut tidak dapat berjalan mulus karena untuk budi daya gurameh dan jamur tiram kondisi wilayah kurang cocok.

Kabupaten Magelang

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalrandu, Kecamatan Srumbung, dan Desa Keningar, Kecamatan Dukun. Desa Tegalrandu memiliki luas wilayah 194,6 ha dan dikepalai oleh Kepala Desa, Ibu Siti Rowiyah. Mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani hortikultura (cabe, tomat, padi, salak) yang sempat lumpuh pasca erupsi, tetapi beruntungnya mendapat bantuan dari Dinas Pertanian pada tahun 2012 yang diajukan melalui kelompok tani dalam bentuk pemberian bibit dan pupuk dengan nama program "Pengembangan Salak Lumut". Pertanian salak semakin melebar pasca erupsi. Selain salak, ada kelapa genjah pada tahun 2010. Pasca erupsi 2010 kegiatan penghijauan yang pernah dilakukan oleh masyarakat desa tersebut bersama dengan LSM Pasak Merapi di wilayah taman nasional pada tahun 2012 ditanam tanaman keras seperti pinus (hasil wawancara dengan Ibu Siti Rowiyah, Kepala Desa Tegalrandu). Pernah ada pemberian bibit seperti sengan tetapi tidak dapat ditanam dikarenakan lahan di Desa Tegalrandu terbatas untuk pertanian.

Pada tahun 2013, Balai TNGM pernah melakukan penghijauan, namun dirasa pohon yang ditanam tidak produktif karena hanya asal memberikan bibit saja dan tidak mempertimbangkan apakah bibit tersebut dapat hidup atau tidak dengan kontur tanah di Desa Tegalrandu. Berdasarkan wawancara di lapangan terhadap responden (Ibu Siti Rowiyah, Kepala Desa Tegalrandu), Balai TNGM pernah mengadakan penyuluhan kebakaran tetapi hal itu terjadi sebelum erupsi, namun setelah erupsi tidak ada karena kebanyakan kegiatan taman

nasional lebih condong ke arah Desa Ngargosoko yang dirasa lebih potensial karena memiliki hutan daerah.

Menurut warga hal yang perlu disegerakan adalah pembagian zonasi terkait tentang kawasan yang boleh dimanfaatkan dan yang tidak boleh, karena masyarakat sedikit banyak bergantung secara ekonomi terhadap kawasan hutan di Lereng Merapi. Tidak adanya patok untuk zonasi memungkinkan terjadinya kericuhan semisal warga menanam pohon di dekat taman nasional dan ketika menebang kepunyaan sendiri bisa menimbulkan kesalahpahaman. Biasanya masyarakat memanfaatkan hasil hutan hanya berupa ranting dan rumput yang sudah jatuh dan bukan menebang pohon di TNGM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ambar (petani), Dusun Pule, Desa Tegalrandu, kegiatan rutin sampai saat ini yang dilakukan BTNGM bersama masyarakat setempat dalam melestarikan sumber daya hutan adalah dengan adanya kegiatan yang melibatkan warga dan diberi upah sekitar 40.000/hari, sedangkan kerusakan pasca erupsi 2010, masyarakat tidak mendapatkan kompensasi dari pemerintah atas kerusakan tanaman pertanian dan peternakan, hanya diminta mendata kerusakan yang terjadi (mendata jumlah ikan mati). Ada kegiatan dari LSM dalam hal pemberdayaan ekonomi, sedangkan untuk program padat karya membersihkan rumah dari Dinas Sosial dengan bayaran sehari 30.000 dan itu sebatas bantuan skala kecil. Hal yang menjadi perhatian antara Desa Tegalrandu dan taman nasional mengenai penambangan pasir yang berlebihan disebabkan pasir yang ditambang berada di dalam Kawasan Taman Nasional yang terlarang untuk dieksploitasi.

Sementara itu, Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang yang memiliki ketinggian 850 mdpl dan dikepalai oleh Pak Tarmuji sebagai kepala desa, masyarakatnya rata-rata bermata-pencaharian sebagai petani padi, cabai, kubis, dan tomat. Selain bertani tanaman pangan, warga Desa Keningar mempunyai tanaman keras yang ditanam di lahan sendiri seperti Kaliandra, kayu putih. Setelah erupsi merapi 2010, kegiatan penghijauan berupa bantuan penghijauan secara langsung yaitu senganisasi dan mahoni pada tahun 2011 dari TNI/ABRI, serta dari pemerintah (Dinas Pertanian Perkebunan) tidak ada diberi bibit tanaman keras. Setelah

diberikan bibit oleh TNI/ABRI, masyarakat menanam dan merawat tanaman tersebut dengan secara sukarela. Adapun bantuan yang tidak langsung yaitu bantuan dari dinas pertanian berupa tanaman jambu dan kopi pada tahun 2011/2012. Dikatakan tidak langsung karena dinas hanya memberikan bibit saja dan yang menanam dan merawat diserahkan kepada masyarakat setempat. Kendala yang dihadapi ialah pemberian bibit pada waktu yang tidak tepat karena diberikan pada musim kemarau dan banyak tanaman yang mati. Balai TNGM pernah melakukan kegiatan penghijauan dan kegiatan lainnya dalam upaya pelestarian hutan pasca erupsi 2010, yakni musyawarah antara warga dengan taman nasional sebanyak dua kali (bulan april dan mei) mengenai sosialisasi rencana untuk penghijauan yang akan dilakukan pada tahun 2014 dan 2015. Pohon yang akan ditanam berupa pohon gayam dan duwet. Selain itu, ada penghijauan yang dilakukan oleh pihak swasta tetapi mekanisme tidak melalui desa, semisal uji coba tanam sendiri yang dilakukan oleh organisasi Citra Kasih (organisasi non muslim) secara pribadi. Penanaman tersebut dilakukan di bantaran sungai yang bekas terkena erupsi. Pasca erupsi membuat mata air berkurang dan pertanian kacau karena irigasi rusak total. Baru pada tahun 2013 bisa menikmati air untuk persawahan dari Senowo. Pemerintah memberikan kompensasi berupa sembako bagi masyarakat sekitar untuk kerusakan rumah yang rusak parah pasca erupsi. Permasalahan lain yang ditemui di lapangan adalah adanya praktik penambangan ilegal.

Kabupaten Boyolali

Penelitian di Kabupaten Boyolali dilakukan di Desa Suroteleng, Kecamatan Selo, dan Desa Wonodoyo, Kecamatan Cepogo. Desa Suroteleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dikepalai oleh Bapak Sutris selaku Kepala Desa. Mata pencaharian masyarakat setempat rata-rata adalah petani tanaman hortikultura dan tembakau. Petani sayur/hortikultura, seperti tomat, cabai, kobis, kentang, dan bawang merah tidak ada perubahan sebelum dan pasca erupsi 2010. Sebagian besar masyarakat mempunyai ternak namun bukan dijadikan komoditas peternakan. Masyarakat tidak mendapatkan kompensasi atas kerusakan pertanian yang terjadi karena erupsi 2010.

Penghijauan pasca erupsi merapi tahun 2010 pernah dilakukan oleh masyarakat atas bantuan dari LSM, namun bukan di wilayah taman nasional, yaitu dengan menanam jambu, mahoni, dan wiyu. Pemerintah pernah berkontribusi untuk penghijauan berupa pemberian bibit kopi, wiyu, jambu, nangka, namun hasilnya tidak maksimal. Sekretaris Daerah Kabupaten dan Provinsi pernah memberikan bibit dan pupuk, sedangkan baru-baru ini dilakukan penanaman seribu pohon dari komunitas, bukan dari pemerintah maupun taman nasional. Penghijauan juga pernah dilakukan oleh Romo di Boyolali (gereja) berupa pemberian bibit jambu untuk lahan pribadi dan bibit suren dari kelompok tani untuk ditanam di lahan pribadi.

Upaya dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi tentang kegiatan penghijauan di daerah ini belum ada. Perangkat desa pernah mengajukan ide tersebut pada saat pertemuan, namun belum ada tanggapan dari BTNGM. Masyarakat Suroteleng sebenarnya memerlukan upaya penyuluhan dan sosialisasi zonasi karena masyarakat menganggap hal tersebut dirasa penting. Dengan belum adanya kegiatan tersebut, bukan berarti pemerintah tidak memberikan perhatian lebih karena pernah ada bantuan dari pemerintah melalui gabungan kelompok tani (gapotan) berupa bibit dan pupuk.

Ketegasan dari BTNGM untuk meningkatkan upaya konservasi dibuktikan dengan adanya mekanisme sanksi terhadap tiga warga yang menebang kayu di perbatasan, namun dikira menebang kayu yakni dengan sanksi penanaman beberapa pohon. Kecemburuan sosial Desa Suroteleng tergambar jelas dengan unek-unek dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Desa Suroteleng seperti tidak tersentuh oleh taman nasional karena tidak diberikan pesawat HT untuk komunikasi seperti di desa lainnya.

Adapun di Desa Wonodoyo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sayuran dan tembakau, tetapi lebih diandalkan tembakaunya daripada sayurannya. Ada beberapa warga yang memanfaatkan rumput di wilayah TNGM untuk ternaknya yakni mengambil pohon yang ambruk, pohon mati, dan kayu kering. Kegiatan penghijauan yang dilakukan masyarakat pasca erupsi adalah penanaman sengon, akasia, dan suren yang merupakan pemberian dari Dinas Kehutanan

dan Perkebunan. Masyarakat diberi bibit untuk ditanam disekitar lereng dan tebing jurang, serta ada juga yang di lahan pribadi. Selain pemberian dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPSDA memberikan bibit berupa mangga, jeruk, nangka, dan alpukat. Upaya nyata dari masyarakat adalah dengan penghijauan di lahan sendiri dilakukan secara sukarela dengan penanaman akasia, beringin, dan pinus. Hal tersebut disebabkan kesadaran akan pentingnya Gunung Bibi oleh masyarakat Wonodoyo membuat mereka aktif dalam pelestarian TNMG, khususnya Gunung Bibi. Upaya penghijauan dari BTNGM pernah dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali. Penghijauan di daerah wonodoyo dilakukan secara berkelanjutan, karena kawasan taman nasionalnya masih luas dan menjadi tumpuan desa, sedangkan posisi Gunung Bibi sendiri memang seperti melindungi desa agar tidak terkena erupsi. Pasca erupsi 2010 membuat Gunung Bibi menjadi gundul akibat erupsi, lalu dilakukan upaya dari Dinas Kehutanan (Pak Bambang) yang mengajak warga untuk menanam dengan kompensasi pengupahan. Di desa wonodoyo lebih terstruktur dalam pemberian bibit untuk penghijauan, yakni bantuan untuk petani pasca erupsi dari pemerintah dalam bentuk pemberian bibit wortel, bawang merah, cabai, kubis, dan tomat. Terhadap kerugian dalam hal pertanian pemerintah tidak memberikan kompensasi berupa uang, namun memberikan bibit yang sama. Sementara itu, kerugian ternak berupa sapi yang mati akibat erupsi diberikan ganti berupa ternak sapi lagi. Pasca erupsi pertanian lumpuh selama 1 tahun, ada bantuan dari pemerintah, pemberian bibit sayur-sayuran (loncang, bawang merah, wortel, kentang), namun masih terkendala abunya yang masih tebal.

Sebelum dan sesudah erupsi ada penyuluhan mengenai perusakan hutan dengan menghimbau warga untuk tidak merusak pohon dan jika ada warga yang melanggar akan dikenai sanksi yang tegas. Terhitung ada dua kali sosialisasi yang dilakukan secara serentak. Selain itu, dilakukan penyuluhan tentang biogas dari kotoran ternak serta program mengenai satwa yang dilakukan dengan melepaskan tujuh trenggiling di Gunung Bibi pada tahun 2012 agar ekosistemnya terjaga lagi. Penyuluhan juga dilakukan agar masyarakat tidak mengganggu satwa karena burung kutut dan jalak di Desa Wonodoyo diburu hingga hampir punah. Penyuluhan tersebut dilatarbelakangi juga

dengan adanya satwa yang merugikan petani yaitu kera yang mengakibatkan banyak tanaman sayur (wortel, kubis, ubi kayu) petani yang dirusak dan dimakan oleh kera ekor panjang.

Kabupaten Klaten

Penelitian ini dilakukan di Desa Balerante tepatnya di Dusun Sambungrejo yang merupakan daerah rawan bencana karena sudah berjarak sangat dekat kira-kira 4,5 km dari Gunung Merapi yang otomatis rawan terkena bencana letusan Gunung Merapi. Pada awal 2011, ada sosialisasi dari pemerintah (BPBD) untuk merelokasi Dusun Sambungrejo. Dari hasil wawancara dengan Pak Jainu, Kepala Dusun Sambungrejo, sosialisasi pertama memberikan tawaran kompensasi seharga Rp. 37500/meter tanah masyarakat. Tujuan merelokasi selain melindungi masyarakat atas kerawanan bencana letusan, tetapi juga merencanakan untuk menjadikan dusun tersebut sebagai hutan lindung. Sosialisasi kedua, pemerintah memberikan tawaran masyarakat untuk tetap direlokasi tetapi tanah di Dusun Sambungrejo tetap menjadi hak milik masyarakat. Tanggapan masyarakat atas kedua sosialisasi tersebut adalah menolak. Dengan swadaya dan gotong royong, masyarakat membangun kembali hunian mereka yang rusak dibantu oleh beberapa pihak swasta. Penghijauan atas kawasan yang rusak karena erupsi 2010 dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan perorangan. Peran BTNGM dalam upaya penghijauan dengan pelibatan masyarakat nyata diimplementasi di daeran ini salah satunya dengan program penghijauan bekerjasama dengan UGM, BTNGM, masyarakat HPKKH di hutan Prof. Dr. Koesnadi. Selain itu, BTNGM memiliki program khusus untuk penghijauan 2012-2013 yang melibatkan 40 orang masyarakat untuk menanam tanaman yang berupa sengon dan jabon. Pak Diro, Ketua RT Dusun Sambungrejo, juga mengatakan bahwa selain menanam masyarakat juga merawat tanaman tersebut dengan diberi upah Rp. 50.000/hari, sedangkan lamanya pekerjaan tersebut sekitar seminggu sampai dua minggu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada penghujung tahun 2010 terjadi erupsi Gunung Merapi. Erupsi tersebut menelan korban jiwa sebanyak 70000 jiwa di 32 desa. Erupsi tersebut mengakibatkan korban jiwa,

kerusakan rumah-rumah penduduk, dan kerusakan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kerusakan di kawasan TNGM menjadikan kawasan itu memerlukan upaya pengelolaan konservasi lebih lanjut. Di dalam Penelitian ini, disimpulkan tentang strategi Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi adalah dengan program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan berupa penanganan kasus tindak pidana kehutanan, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan wisata alam, model desa konservasi, pembentukan atau pembinaan kader konservasi dan kelompok pecinta alam, restorasi ekosistem kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort, penyelesaian kasus hukum perambahan kawasan konservasi, perkembangan spesies terancam punah prioritas, pencegahan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan.

Adapun strategi pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan sumber daya hutan pasca erupsi 2010 adalah dengan melakukan penghijauan yang melibatkan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan pemberian upah. Selain itu, dilakukan juga dengan pemberian bibit gurameh dan jamur tiram serta pengadaan penyuluhan terkait dengan Taman Nasional Gunung Merapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andono A. 2008. Polisi kehutanan tingkat ahli, mungkinkah? Diunduh pada 18 April 2013 dari www.worldpress.com.
- Antaraneews. 2010. PVMBG: erupsi merapi 2010 terburuk sejak 1870. Diunduh pada 18 Januari 2012 dari www.antaraneews.com.
- Balai Taman Nasional Gunung Merapi. 2008. Laporan Tahunan Tahun 2008. Balai Taman Nasional Gunung Merapi-Departemen Kehutanan.
- Balai Taman Nasional Gunung Merapi. 2009. Laporan Tahunan Tahun 2008. Balai Taman Nasional Gunung Merapi-Departemen Kehutanan.
- Balai Taman Nasional Gunung Merapi. 2011. Laporan Tahunan Tahun 2010. Balai Taman Nasional Gunung Merapi-Departemen Kehutanan.
- Balai Taman Nasional Gunung Merapi. 2012. Laporan Tahunan Tahun 2011. Balai Taman Nasional Gunung Merapi-Departemen Kehutanan.
- Balai Taman Nasional Gunung Merapi. 2013. Laporan Tahunan Tahun 2012. Balai Taman Nasional Gunung Merapi-Departemen Kehutanan.
- Miner JB dan GA Steiner. 1988. Kebijakan dan strategi manajemen. Edisi Kedua. Erlangga, Jakarta.
- Salusu. 1996. Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi non profit. Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. Metode penelitian kuantitatif kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara 2009-140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Lembaran Negara RI 1990-49, Tambahan Lembaran Negara RI No. 341
- WRI, IUCN, dan UNEP. 1995. Strategi keanekaragaman hayati global. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.